

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota besar di Kalimantan Selatan yang dikenal dengan sebutan *Kota Seribu Sungai*. Secara geografis, wilayah Banjarmasin terletak di antara  $3^{\circ}19'$  sampai  $3^{\circ}22'$  Lintang Selatan serta  $114^{\circ}32'$  sampai  $114^{\circ}39'$  Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 98,46 km<sup>2</sup>.<sup>69</sup> Kota ini terbagi atas 5 kecamatan dan 52 kelurahan, dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Keberadaan sungai-sungai besar, seperti Sungai Martapura dan Sungai Barito, menjadi ciri khas yang membentuk identitas sosial ekonomi dan budaya masyarakat Banjarmasin. Namun, kondisi ini juga menjadikan kota ini rentan terhadap bencana banjir akibat luapan air sungai maupun curah hujan tinggi.

Berdasarkan Peta Bahaya Banjir Kota Banjarmasin yang disusun oleh BNPB dan BPBD, wilayah Banjarmasin menunjukkan tingkat kerawanan yang bervariasi. Warna kuning pada peta menandakan daerah dengan tingkat bahaya rendah, oranye menunjukkan tingkat sedang, dan merah menandakan tingkat bahaya tinggi. Dari peta tersebut terlihat bahwa sebagian besar wilayah Banjarmasin berada pada kategori sedang hingga tinggi, terutama di wilayah selatan dan timur kota seperti Kecamatan Banjarmasin Selatan,

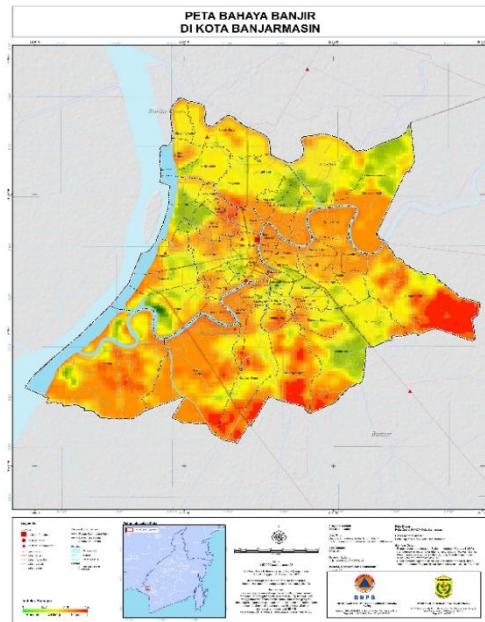
---

<sup>69</sup> “Profil Kota Banjarmasin,” *Website Pemerintah Kota Banjarmasin*, t.t., diakses 25 Agustus 2025, <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html>.

Banjarmasin Timur, dan sebagian Banjarmasin Utara. Hal ini sejalan dengan karakteristik geografis kota yang berada di dataran rendah, dengan ketinggian rata-rata hanya 0,16 meter di atas permukaan laut, serta sebagian wilayahnya berupa rawa-rawa dan bantaran sungai.

Letak geografis yang demikian menyebabkan sistem drainase alami kota sangat bergantung pada fungsi sungai. Akan tetapi, sedimentasi, penyempitan alur sungai, serta aktivitas masyarakat yang memanfaatkan sungai untuk berbagai keperluan seringkali memperparah potensi genangan air. Dengan kata lain, posisi strategis Banjarmasin sebagai kota perdagangan dan jasa di Kalimantan justru dihadapkan pada tantangan ekologis berupa ancaman banjir yang memerlukan penanganan serius. Oleh sebab itu, penelitian yang berfokus pada fungsi drainase dan kinerja Dinas PUPR menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan pembangunan mampu menyeimbangkan pertumbuhan kota dengan mitigasi risiko bencana.

**Gambar 4. 1 Peta Kota Banjarmasin**



Sumber: Dinas BPBD Kota Banjarmasin (2022)

## 2. Profil Dinas PUPR Kota Banjarmasin

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota (PUPR) Kota Banjarmasin adalah sebuah lembaga pemerintah yang berada di Kota Banjarmasin, Lembaga ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan Penataan ruang kota di suatu wilayah.

Tugas utama dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota meliputi perizinan serta pengawasan dalam hal pekerjaan dan penataan pembangunan Kota serta edukasi masyarakat tentang prosedur pembangunan di kota Banjarmasin.

Dengan Visi “**Prima dalam pelayanan, handal dalam penyediaan infrastruktur dan mantap dalam penataan ruang menuju sinergitas pembangunan yang dinamis**” adapun Misi.<sup>70</sup>

- a. Menyelenggarakan tata laksana pemerintahan yang baik dan benar dengan meningkatkan Sumber Daya Aparatur.
- b. Meningkatkan jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kota yang berkesinambungan dengan aksesibilitas antar wilayah yang memadai untuk melayani kawasan pemukiman dan kawasan strategis di Kota Banjarmasin.
- c. Meningkatkan pembangunan dan peningkatan jaringan drainase yang terpadu dengan serta meningkatkan aliran sungai yang bebas hambatan dan bantaran sungai yang tertata baik, indah dan nyaman.
- d. Mewujudkan ketersediaan dan pengembangan prasarana pemerintah berikut prasarana pendukungnya.
- e. Mengoptimalkan ketersediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air minum dan pengolahan air limbah di Kawasan Pemukiman
- f. Mewujudkan pembinaan, penataan serta pengelolaan bangunan gedung yang memenuhi standar keandalan bangunan gedung
- g. Menciptakan keserasian tata ruang wilayah melalui perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan ruang yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

---

<sup>70</sup> “Visi Dan Misi,” *Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang*, 8 September 2025, <https://pupr.banjarmasinkota.go.id/p/visi-dan-misi.html>.

### **3. Tugas dan Fungsi Bidang Sungai dan Drainase Dinas PUPR Kota Banjarmasin**

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2022 secara tegas menetapkan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Dinas PUPR sebagai landasan operasional. Berdasarkan peraturan ini, Dinas PUPR bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah.

Tugas dan Fungsi Khusus Bidang Sumber Daya Air (Sungai dan Drainase) Meski detail uraian tidak dipublikasikan secara terbuka di situs resmi, secara umum Bidang Sumber Daya Air (termasuk *subprocess* sungai dan drainase) memiliki mandat berikut berdasarkan praktik nasional dan dokumen Dinas PUPR:

- a. Merumuskan kebijakan teknis terkait perencanaan pengendalian banjir, normalisasi sungai, serta penataan sistem drainase yang terintegrasi dengan tata ruang kewilayahannya.
- b. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi infrastruktur sungai dan drainase, seperti pengeringan sedimen, perbaikan saluran, serta pengembangan sistem pengendalian banjir perkotaan.
- c. Mengelola data dan informasi sumber daya air, termasuk pencatatan debit, titik banjir, simpanan air hujan, sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan.

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi infrastruktur, kualitas aliran, dan distribusi air, guna memastikan fungsi drainase dan sungai tetap optimal.
- e. Melibatkan masyarakat, dengan mensosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan saluran, mendorong partisipasi lokal dalam pemeliharaan, serta membangun budaya sadar mitigasi banjir.<sup>71</sup>

Semua fungsi ini selaras dengan misi ke-3 PUPR, yaitu “penataan drainase dan sungai yang lancar, serta bantaran yang tertata dan nyaman”.

Efektivitas pengendalian banjir di kota rendah semacam Banjarmasin tergantung pada “kombinasi antara desain teknis yang tepat, perawatan berkala, data monitoring *realtime*, dan keterlibatan masyarakat” menandai pentingnya pelaksanaan fungsi-fungsi di atas agar tidak hanya formalitas, melainkan berkelanjutan.

Dengan demikian, bidang Sungai dan Drainase dalam Dinas PUPR bertanggung jawab atas keseluruhan siklus pengelolaan air dari perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, hingga evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>71</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2020–2024,” Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, t.t.

#### 4. Struktur Dinas PUPR Kota Banjarmasin

#### **Gambar 4. 2 Struktur Dinas PUPR Kota Banjarmasin**



Sumber: Website Dinas PUPR Kota Banjarmasin (2023)

## B. Penyajian Data

## 1. Identitas Informan dan Uraian Hasil Wawancara (Nama,Jabatan,Pendidikan Terakhir,dan Alamat)

### a. Informan Pertama

Nama : Sholikin, ST. MT.

Umur : 44 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Jabatan : Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda

## Pengelolaan Sumber Daya Air

Alamat : Jalan Belitung Darat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sholikin dari Bidang

Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin, dapat dipahami bahwa kinerja

bidang sungai sangat erat kaitannya dengan indikator yang telah ditetapkan dalam Perwali No. 58 Tahun 2022. Pertama, dalam aspek perencanaan dan program pengendalian banjir, beliau menekankan pentingnya penyusunan rencana kerja berbasis data kondisi sungai di lapangan. Menurutnya, program-program seperti normalisasi sungai, pengerukan sedimen, serta pembangunan tanggul darurat menjadi prioritas dalam menekan risiko genangan. Namun, ia juga mengakui adanya keterbatasan anggaran yang membuat perencanaan tidak bisa sekaligus menyangsar seluruh titik rawan banjir di Kota Banjarmasin.

Pada aspek pemeliharaan sungai dan drainase secara rutin, Bapak Sholikin menjelaskan bahwa kegiatan seperti pengerukan, pembersihan sampah, dan penguatan tebing sungai dilakukan secara periodik. Akan tetapi, faktor perilaku masyarakat yang masih sering membuang sampah ke sungai menjadi kendala besar. Ia menegaskan bahwa meskipun Dinas PUPR melakukan pembersihan secara berkala, masalah banjir tidak bisa sepenuhnya terselesaikan tanpa perubahan perilaku warga.

Indikator ketiga, yaitu pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir, menurut beliau dilakukan melalui pembangunan pintu air, perbaikan jembatan yang menghambat aliran, hingga pelebaran sungai pada titik-titik kritis. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sungai menampung debit air saat curah hujan tinggi dan pasang besar terjadi.

Selanjutnya, terkait monitoring, evaluasi, dan ketersediaan data sumber daya air, Bapak Sholikin menekankan bahwa pihaknya rutin melakukan pemetaan daerah aliran sungai, termasuk pencatatan titik banjir, tinggi muka air, dan laju sedimentasi. Data ini kemudian digunakan untuk evaluasi tahunan dalam penyusunan program berikutnya. Ia menyebutkan bahwa ketersediaan data menjadi faktor penting agar kebijakan yang diambil berbasis pada kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar asumsi.

Terakhir, mengenai pelibatan dan pemberdayaan masyarakat, Bapak Sholikin menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya menggandeng masyarakat melalui program sosialisasi dan kerja bakti bersama di lingkungan sekitar sungai. Ia menilai bahwa partisipasi warga, misalnya dengan menjaga kebersihan bantaran dan tidak mendirikan bangunan di sempadan sungai, merupakan kunci keberhasilan program pengendalian banjir. Tanpa kesadaran kolektif, seluruh infrastruktur yang dibangun pemerintah tidak akan maksimal dalam menekan risiko banjir.<sup>72</sup>

Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan Bapak Sholikin menunjukkan bahwa Bidang Sungai berupaya melaksanakan seluruh indikator kinerja sebagaimana diatur dalam Perwali, meskipun dihadapkan pada tantangan anggaran, keterbatasan teknis, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

---

<sup>72</sup> Solikin, "Wawancara Pribadi," 6 Agustus 2025, Kantor PUPR Kota Banjarmasin.

### **b. Informan Kedua**

Nama	: Muhammad Faiz, ST
Umur	: 43 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S1 Teknik Pengairan
Jabatan	: Fungsional Muda Teknik Pengairan
Alamat	: Guntung Manggis, Banjarbaru

Dalam wawancara dengan Bapak Faiz selaku pejabat pada bidang drainase Dinas PUPR Kota Banjarmasin, penekanan utama adalah bagaimana indikator kinerja pengendalian banjir berdasarkan Perwali No. 58 Tahun 2022 diterjemahkan ke dalam kegiatan teknis sehari-hari. Beliau menjelaskan bahwa indikator pertama, yakni perencanaan dan program pengendalian banjir, diwujudkan melalui penyusunan masterplan drainase kota yang terintegrasi dengan rencana tata ruang. Menurutnya, Banjarmasin sebagai kota dengan kontur lahan rendah sangat memerlukan perencanaan berbasis data hidrologis dan proyeksi iklim, agar pola saluran mampu menyesuaikan dengan potensi curah hujan ekstrem dan pasang surut air sungai.

Untuk indikator kedua, yaitu pemeliharaan sungai dan drainase secara rutin, Bapak Faiz menekankan bahwa rutinitas ini menjadi inti dari tugas bidang drainase. Kegiatan pembersihan sedimen dan sampah pada saluran drainase dilakukan secara berkala melalui kerja sama dengan kontraktor maupun partisipasi masyarakat. Namun, beliau juga mengakui adanya kendala berupa keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran

warga yang masih membuang sampah ke saluran. Hal ini membuat hasil pemeliharaan tidak bertahan lama.

Terkait indikator ketiga, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir, Bapak Faiz menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan pembangunan *box culvert*, normalisasi drainase primer, serta rehabilitasi gorong-gorong tua yang sudah tidak memadai. Menurutnya, pembangunan baru sering diprioritaskan pada titik rawan genangan dengan ketinggian air yang mencapai 30 cm dan bertahan lebih dari dua jam, sesuai kriteria banjir PUPR. Rehabilitasi infrastruktur lama juga dilakukan agar dapat menampung debit air yang lebih besar, sejalan dengan kondisi iklim sekarang yang semakin ekstrem.

Dalam kaitannya dengan indikator keempat, yaitu monitoring, evaluasi, dan ketersediaan data sumber daya air, Bapak Faiz menyebutkan bahwa bidang drainase saat ini sedang memperkuat sistem basis data banjir dengan memanfaatkan laporan warga dan pencatatan debit air dari titik pantau. Data ini digunakan tidak hanya untuk mengevaluasi efektivitas pembangunan drainase, tetapi juga untuk perencanaan tahun berikutnya. Walaupun masih ada keterbatasan pada sistem teknologi informasi, ia menegaskan bahwa upaya digitalisasi terus diarahkan agar evaluasi lebih akurat.

Akhirnya, mengenai indikator kelima, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat, Bapak Faiz menekankan bahwa keberhasilan pengendalian banjir tidak akan tercapai hanya dengan infrastruktur. Partisipasi warga

melalui kegiatan gotong royong membersihkan saluran, menjaga sempadan sungai, dan mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan faktor kunci. Dinas PUPR melalui bidang drainase juga menjalin koordinasi dengan kelurahan serta kelompok masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif. Menurutnya, tanpa keterlibatan aktif masyarakat, semua pembangunan akan menjadi tidak berkelanjutan.<sup>73</sup>

Secara keseluruhan, wawancara dengan Bapak Faiz menunjukkan bahwa upaya drainase tidak hanya berfokus pada aspek teknis pembangunan, tetapi juga pada manajemen, evaluasi, dan pemberdayaan warga. Pendekatan ini sejalan dengan amanat Perwali No. 58 Tahun 2022, yang menekankan pentingnya sinergi lintas bidang dan kolaborasi masyarakat dalam mengatasi tantangan banjir di Kota Banjarmasin.

### c. Informan Ketiga

Nama	: Andy Putera
Umur	: 42 tahun
Pendidikan Terakhir	: STM (TPL)
Jabatan	: TRC
Alamat	: Jl.Jahri saleh Komp.Kenanga II

BPBD menilai bahwa perencanaan program pengendalian banjir yang disusun oleh Dinas PUPR cukup realistik dan komprehensif. Hal ini terlihat dari kesiapan PUPR dalam merespons hasil mitigasi lapangan,

---

<sup>73</sup> Muhammad Faiz, "Wawancara Pribadi," 8 Agustus 2025, Kantor PUPR Kota Banjarmasin.

misalnya ketika ditemukan adanya pendangkalan sungai atau sungai mati yang tertutup pampangan. Begitu laporan masuk dari BPBD, PUPR segera menurunkan tim beserta pasukan turbo untuk melakukan pengeringan dan membuka kembali aliran sungai. Dari sisi koordinasi, BPBD juga menegaskan bahwa perencanaan tidak berjalan sendiri, tetapi melibatkan rapat koordinasi dengan dinas terkait, Walikota, dan Wakil Walikota sehingga hasilnya lebih terarah dan sesuai kebutuhan lapangan.

BPBD menilai pemeliharaan sungai dan drainase oleh PUPR dilakukan secara berkala. Pasukan turbo PUPR secara rutin membersihkan pampangan dan sampah di aliran sungai, serta memperbaiki drainase yang rawan genangan. Sebagai contoh, perbaikan drainase di depan Hotel Arum disebut secara langsung sebagai bentuk tindak lanjut PUPR atas titik genangan yang selalu muncul setiap kali hujan deras. Upaya pemeliharaan ini dianggap tepat sasaran karena terbukti mampu mengurangi genangan secara signifikan.

BPBD juga mengapresiasi pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, termasuk normalisasi sungai, pemasangan *booster*, hingga rehabilitasi drainase. Salah satu contoh nyata adalah pemasangan *booster* di Simpang Empat Arum yang berfungsi mengalirkan air ke sungai besar saat terjadi genangan tinggi, sehingga air cepat surut. Pembangunan ini menurut BPBD merupakan langkah terukur dan sesuai jadwal yang diarahkan oleh Walikota, serta menunjukkan bahwa PUPR tidak hanya

fokus pada pembersihan sementara tetapi juga membangun sistem pengendalian jangka panjang.

Dalam situasi tanggap darurat banjir, PUPR dinilai BPBD sangat cepat dan responsif. Begitu ada laporan dari BPBD mengenai pohon tumbang, pendangkalan sungai, atau aliran tersumbat, PUPR segera menurunkan peralatan dan tenaga teknis. Bahkan dalam kasus banjir di awal 2025 di beberapa kelurahan, PUPR langsung bergerak melakukan penggerukan dan pembukaan aliran sungai yang mati sehingga air cepat surut hanya dalam beberapa hari. Kerja sama ini dianggap efektif karena BPBD sendiri melakukan monitoring 24 jam, lalu langsung meneruskan laporan ke grup lintas instansi yang salah satunya direspon cepat oleh PUPR.

Menurut BPBD, kontribusi PUPR terhadap pengurangan risiko banjir sangat besar dan nyata. Dampaknya terlihat dari semakin berkurangnya titik genangan serta semakin cepatnya air surut setelah dilakukan penanganan. Perbandingan antara banjir besar tahun 2021 dengan kondisi pasca intervensi PUPR di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengendalian banjir. Hal ini disebabkan kombinasi dari perencanaan, pemeliharaan rutin, pembangunan infrastruktur baru, dan respon tanggap darurat yang cepat.<sup>74</sup>

Meski menilai kinerja PUPR efektif, BPBD tetap menggarisbawahi adanya kendala, antara lain keterbatasan anggaran yang sering

---

<sup>74</sup> Adi Nugroho, “Wawancara Pribadi,” 18 Agustus 2025, Jl. MT. Haryono.

menghambat efisiensi, serta tantangan sosial berupa perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas. Selain itu, faktor geografis seperti pendangkalan dan perubahan tata guna lahan juga menjadi tantangan teknis yang memperberat kerja PUPR

#### **d. Informan Keempat**

Nama	:	Hanafi, S. Ap
Umur	:	37 Tahun
Pendidikan Terakhir	:	S1 Administrasi
Jabatan	:	Analis Mitigasi Bencana
Alamat	:	Jl.Jahri Saleh Komp. Kenanga Indah

Menurut Bapak Hanafi, perencanaan pengendalian banjir oleh PUPR sudah mengarah pada pendekatan mitigasi berbasis risiko. Artinya, program yang disusun tidak hanya bersifat reaktif terhadap kejadian banjir, tetapi juga berupaya memetakan wilayah rawan berdasarkan data curah hujan, kontur tanah, serta kondisi drainase. BPBD melihat bahwa PUPR mulai menyusun rencana yang selaras dengan konsep *early warning system* sehingga titik rawan bisa diantisipasi sebelum genangan meluas. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas perencanaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Bapak Hanafi menekankan pentingnya rutinitas pemeliharaan sungai dan drainase. Menurutnya, PUPR sudah melakukan upaya nyata melalui program pasukan turbo dan pembongkaran sedimentasi. Namun, ia menyoroti bahwa kegiatan ini masih sangat tergantung pada laporan

masyarakat atau hasil monitoring BPBD. Ke depan, ia menyarankan agar pemeliharaan ditopang oleh sistem database drainase terpadu sehingga pemeliharaan bisa lebih sistematis, bukan sekadar berdasarkan aduan insidental.

Dalam pandangan Bapak Hanafi, pembangunan infrastruktur oleh PUPR, seperti *booster*, pintu air, serta normalisasi sungai, memang sudah memberi dampak positif. Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan ini harus diikuti dengan perencanaan tata ruang yang konsisten. Menurutnya, masih ada ketidaksinkronan antara pembangunan drainase baru dengan kepadatan permukiman di bantaran sungai. Jika tata ruang tidak dikendalikan, maka infrastruktur yang dibangun PUPR bisa kembali kehilangan fungsi maksimal.

Bapak Hanafi menyoroti pentingnya indikator keempat ini. Ia menyebutkan bahwa selama ini PUPR cenderung kuat di aspek teknis, tetapi masih lemah dalam pengelolaan data dan evaluasi jangka panjang. Misalnya, data tentang debit air sungai atau catatan intensitas banjir belum terdokumentasi secara rapi sehingga sulit dijadikan dasar evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar PUPR dan BPBD bersama-sama membangun pusat data banjir terpadu yang bisa diakses oleh semua pihak untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Bapak Hanafi, peran masyarakat masih belum optimal. Ia menilai bahwa PUPR memang sudah melibatkan masyarakat dalam program gotong royong membersihkan drainase, tetapi partisipasi tersebut

masih sporadis. Untuk memperkuat indikator ini, ia menyarankan adanya program edukasi berkelanjutan yang menyasar sekolah, komunitas RT/RW, hingga organisasi kepemudaan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya terlibat pada tahap kerja fisik, tetapi juga memiliki kesadaran sejak awal tentang pentingnya menjaga drainase dan sungai.<sup>75</sup>

Secara umum, Bapak Hanafi menilai bahwa PUPR sudah menunjukkan kinerja yang baik, terutama dalam aspek fisik seperti pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur. Namun, tantangan utama justru ada pada aspek non-fisik, yaitu ketersediaan data, sinkronisasi tata ruang, dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, jika ketiga hal ini bisa diperkuat, maka upaya PUPR akan lebih berkesinambungan dan mampu menurunkan risiko banjir dalam jangka panjang.

#### e. **Informan Kelima**

Nama	: Muhammad Nur
Umur	: 56
Pendidikan Terakhir	: SMA
Pekerjaan	: Buruh dan Ketua RT. 16
Alamat	: Jalan Kelayan A, Gang Kenari, RT 16 No. 3

Bapak Muhammad Nur menyampaikan bahwa hingga saat ini ia belum pernah mengetahui adanya program khusus dari PUPR Kota Banjarmasin terkait perencanaan pengendalian banjir di wilayah RT 16. Menurutnya, setelah banjir besar tahun 2021, belum ada tindak lanjut

---

<sup>75</sup> Hanafi, "Wawancara Pribadi," 5 Agustus 2025, Kantor BPBD Kota Banjarmasin.

berupa program atau rencana baru yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Selama menjabat RT baru satu tahun, ia belum menerima informasi tentang rencana pengendalian banjir di lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perencanaan masih belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat setempat.

Karena lokasi RT 16 berada di pinggir sungai dan tidak memiliki sistem drainase, warga sangat bergantung pada kondisi sungai. Menurut Bapak Muhammad Nur, pemeliharaan berupa pengeringan sungai pernah dilakukan, namun terakhir kali sekitar sebelum banjir 2021. Setelah itu, ia belum melihat lagi ada kegiatan pemeliharaan rutin dari PUPR. Akibatnya, setiap bulan pasang air, rumah warga hampir selalu kebanjiran karena air sungai meluap ke pemukiman. Fakta ini memperlihatkan bahwa pemeliharaan sungai belum konsisten dilakukan.

Dalam wawancara, beliau menegaskan bahwa belum ada pembangunan atau perbaikan infrastruktur pengendalian banjir baru di wilayahnya, selain infrastruktur umum seperti pembuatan WC dan sebagian jalan yang dibantu oleh dinas provinsi maupun Baznas. Tidak adanya tanggul atau fasilitas pengendali air lain di sekitar pemukiman membuat warga sangat rentan terhadap luapan sungai. Dari keterangan ini, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur pengendalian banjir masih belum menjangkau wilayah padat penduduk di pinggir sungai.

Bapak Muhammad Nur menyebutkan bahwa masyarakat di lingkungannya belum pernah menerima informasi mengenai sistem

monitoring atau evaluasi banjir dari PUPR. Meski warga pernah melaporkan kondisi banjir melalui grup WhatsApp RT, RW, maupun BPK, laporan tersebut hanya sampai ke tingkat kelurahan dan tidak ada tindak lanjut ke dinas. Dengan demikian, mekanisme monitoring dan evaluasi di lapangan belum terintegrasi dengan baik, sehingga masyarakat tidak merasa terhubung dengan sistem penanggulangan banjir resmi.

Dalam aspek pelibatan masyarakat, narasumber mengakui bahwa warga hanya pernah diajak gotong royong kebersihan atau pengangkutan sampah oleh kelurahan, namun bukan dalam bentuk program PUPR. Ia berharap pemerintah tidak hanya menyuruh masyarakat membersihkan sungai, tetapi juga memberi contoh nyata dengan turun langsung ke lapangan sehingga warga lebih termotivasi untuk ikut menjaga sungai. Menurutnya, partisipasi masyarakat akan lebih baik jika pemerintah hadir secara konsisten dengan program pemberdayaan yang nyata.<sup>76</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Nur, dapat dilihat bahwa kinerja PUPR Kota Banjarmasin di wilayah pinggiran sungai RT 16 masih belum optimal dalam lima indikator utama. Perencanaan dan pembangunan infrastruktur banjir belum terasa, pemeliharaan sungai tidak rutin, monitoring dan evaluasi kurang terintegrasi, serta pelibatan masyarakat masih minim. Aspirasi warga menekankan perlunya program nyata dari pemerintah agar masyarakat dapat ikut aktif menjaga sungai.

---

<sup>76</sup> Muhammad Nur, "Wawancara Pribadi," 15 Agustus 2025, Jalan Kelayan A, Gang Kenari.

### **f. Informan Keenam**

Nama	: Idijar Yanuar Nor
Umur	: 54 tahun
Pendidikan Terakhir	: SMP
Pekerjaan	: Tukang Bangunan dan Ketua RT 1
Alamat	: Jalan Seberang Masjid, RT 1

Bapak Idijar mengaku belum mengetahui secara rinci program kerja PUPR terkait pengendalian banjir. Selama ini, ia hanya menyampaikan masalah-masalah lingkungan seperti sampah dan himbauan agar warga tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, usulan terkait pengendalian banjir biasanya disampaikan melalui musrenbang kelurahan, namun realisasi dari usulan tersebut berjalan lambat. Karena itu, ia dan pengurus RT-RW akhirnya langsung mengusulkan ke DPRD agar lebih cepat ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan PUPR belum sepenuhnya transparan dan dipahami oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Berdasarkan keterangan narasumber, wilayah RT 1 dan RT 2 setiap tahun masih mengalami genangan akibat luapan sungai, meski tidak separah banjir 2021. Ia mengingat bahwa normalisasi sungai terakhir dilakukan pada tahun 2022, sementara kegiatan pembersihan eceng gondok (ilung) pernah terlihat di kawasan Benua Anyar, bukan di wilayahnya. Dengan demikian, pemeliharaan sungai dinilai masih kurang

intensif, sehingga dampak luapan air sungai tetap dirasakan warga tiap tahun.

Idijar menjelaskan bahwa salah satu masalah utama adalah kerusakan jalan akibat luapan air sungai di batas RT 1 dan RT 2. Jalan tersebut baru diperbaiki pada tahun 2024, tetapi sekarang sudah kembali rusak parah karena tidak ada pembatas (siring) atau sistem penahan air di samping jalan. Ia menilai pembangunan jalan tanpa infrastruktur penahan air membuat daya rusak sungai tidak terkendali. Untuk itu, warga melalui musrenbang mengusulkan pembangunan siring beton, namun hingga kini masih dalam tahap usulan. Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur pengendalian banjir oleh PUPR masih belum menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.

Menurut narasumber, mekanisme pelaporan dari masyarakat ke PUPR belum jelas. Selama ini laporan hanya disampaikan ke kelurahan, kecamatan, hingga RW. Meski PUPR pernah turun meninjau, tindak lanjutnya dirasakan lambat. Idijar berharap ada sosialisasi yang jelas dari PUPR tentang mekanisme pelaporan banjir dan kerusakan infrastruktur agar masyarakat tidak hanya mengandalkan jalur informal. Dengan demikian, terlihat bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan PUPR masih belum maksimal di mata warga.

Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, Idijar menyebutkan bahwa warga di lingkungannya masih mau diajak gotong royong menjaga kebersihan, meski belum merata. Ia menilai PUPR jarang melibatkan

warga secara langsung, bahkan proyek penggeraan infrastruktur biasanya dikerjakan pihak ketiga melalui sistem lelang sehingga warga tidak terlibat. Selain itu, masyarakat pernah menolak pembangunan drainase yang diusulkan di RT 5 dan RT 6, karena dianggap percuma jika masalah utama yaitu luapan sungai tidak ditangani dengan meninggikan jalan atau membangun siring. Ini menunjukkan perlunya strategi pemberdayaan masyarakat yang lebih terintegrasi dengan kebijakan teknis PUPR.<sup>77</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Idijar Yanuar Nor, terlihat bahwa kinerja PUPR Kota Banjarmasin masih menghadapi tantangan dalam lima indikator utama. Perencanaan belum tersosialisasi, pemeliharaan sungai tidak rutin, pembangunan infrastruktur belum tepat sasaran, monitoring belum jelas, dan pemberdayaan masyarakat masih lemah. Namun, warga tetap berusaha menjaga lingkungan dengan gotong royong, meski berharap agar pemerintah lebih responsif dan menghadirkan program teknis yang dapat mengurangi dampak luapan sungai secara signifikan.

#### **g. Informan Ketujuh**

Nama	:	RahmaWati
Umur	:	25 tahun
Pendidikan Terakhir	:	SMA
Pekerjaan	:	Pegawai Depot Air Isi Ulang

---

<sup>77</sup> Idijar Yanuar Nor, "Wawancara Pribadi," 15 Agustus 2025, Jalan Seberang Masjid.

Alamat : Jalan Sungai Andai Blok D Nomor 71,  
Kota : Banjarmasin

Rahma mengaku tidak mengetahui adanya program perencanaan khusus dari PUPR terkait pengendalian banjir di wilayahnya. Ia baru mendengar istilah program semacam itu ketika diwawancara. Menurutnya, sejauh pengamatannya, belum ada kegiatan yang jelas dari pemerintah, kecuali satu kali pembersihan setelah banjir besar. Hal ini memperlihatkan bahwa sosialisasi program PUPR kepada masyarakat masih minim, sehingga warga belum paham perencanaan jangka panjang yang ada.

Rahma menjelaskan bahwa di lingkungannya hanya pernah ada pembersihan sungai sekali pasca banjir, dan setelah itu tidak ada lagi kegiatan rutin. Bahkan, kegiatan yang ia lihat lebih banyak berupa gotong royong warga membersihkan sampah di sekitar anak-anak sungai. Artinya, pemeliharaan sungai di kawasan Sungai Andai masih jarang dilakukan oleh pemerintah, sehingga warga lebih mengandalkan upaya swadaya masyarakat.

Menurut Rahma, satu-satunya kegiatan pembangunan yang ia ketahui adalah pengrajin pelebaran jalan, yang sempat disertai dengan pembersihan. Namun, ia menegaskan bahwa selain itu belum ada program pembangunan atau rehabilitasi yang fokus untuk pengendalian banjir. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan

infrastruktur penahan banjir dengan program yang dijalankan pemerintah di wilayahnya.

Rahma menuturkan bahwa belum ada tindak lanjut maupun evaluasi yang terlihat dari pemerintah terkait kondisi banjir di wilayahnya. Ia tidak pernah melihat ada survei, pendataan, atau upaya monitoring langsung dari pihak PUPR. Bahkan, ia mengaku tidak tahu bagaimana cara melaporkan permasalahan banjir secara resmi. Fakta ini menegaskan bahwa sistem monitoring dan evaluasi pemerintah masih belum terhubung dengan warga di lapangan.

Dalam hal pelibatan masyarakat, Rahma menyebutkan bahwa sejauh ini yang ada hanyalah kegiatan gotong royong sederhana, seperti membersihkan sampah. Ia belum pernah melihat program yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam penanganan banjir. Harapannya, ke depan pemerintah tidak hanya melakukan kegiatan sekali-sekali, tetapi benar-benar hadir dengan melibatkan warga dalam upaya pengelolaan lingkungan.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan RahmaWati, dapat disimpulkan bahwa kinerja PUPR Kota Banjarmasin di kawasan Sungai Andai masih sangat terbatas. Perencanaan tidak tersosialisasi dengan baik, pemeliharaan sungai jarang dilakukan, pembangunan infrastruktur lebih difokuskan pada pelebaran jalan daripada pengendalian banjir, monitoring dan evaluasi hampir tidak terlihat, serta pelibatan masyarakat hanya

---

<sup>78</sup> RahmaWati, "Wawancara Pribadi," 15 Agustus 2025, Jalan Sungai Andai Blok D.

sebatas gotong royong kecil. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat masih menunggu peran lebih nyata dari pemerintah untuk mengurangi kerentanan wilayah Sungai Andai terhadap genangan banjir tahunan.

#### **h. Informan Kedelapan**

Nama	:	Sayuti
Umur	:	51 tahun
Pendidikan Terakhir	:	SMA
Pekerjaan	:	Tukang Pangkas Rambut
Alamat	:	Jalan Sungai Jingah, Kota Banjarmasin

Bapak Sayuti menjelaskan bahwa selama tinggal di kawasan Sungai Jingah, ia belum pernah melihat adanya program perencanaan pengendalian banjir dari pemerintah, khususnya Dinas PUPR. Ia menyebutkan bahwa banjir besar hanya terjadi sekali pada tahun 2021, yang cukup parah hingga masuk ke dalam rumahnya. Namun, selain itu, banjir yang ada lebih berupa luapan air pasang yang hanya menggenangi jalan. Hal ini menunjukkan bahwa program pengendalian banjir tidak pernah disosialisasikan secara langsung ke warga setempat.

Dalam aspek pemeliharaan, Sayuti menegaskan bahwa belum ada kegiatan dari pihak dinas terkait. Ia hanya mengetahui adanya gotong royong warga untuk membersihkan sampah di pinggir sungai, namun sifatnya sporadis dan hanya sebagian warga saja yang terlibat. Masalah utama menurutnya justru berasal dari perilaku masyarakat yang sering

membuang sampah ke sungai sehingga menyebabkan pendangkalan dan berpotensi memperparah banjir.

Sayuti menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah di daerahnya untuk mengatasi masalah banjir. Tidak ada upaya normalisasi maupun pengerajan siring atau tanggul di kawasan Sungai Jinga. Menurutnya, pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas pembuangan sampah seperti bak sampah agar aliran sungai tidak semakin dangkal akibat sampah rumah tangga.

Sayuti menuturkan bahwa dirinya tidak pernah melihat adanya monitoring atau evaluasi dari pihak pemerintah terkait banjir maupun pendangkalan sungai di wilayahnya. Antisipasi yang dilakukan warga hanya sebatas menunggu musim pasang tiba dan bersiap menghadapi luapan air. Tidak ada keterlibatan aparat pemerintah dalam memantau atau mengevaluasi kondisi sungai, sehingga warga merasa dibiarkan menghadapi banjir secara mandiri.

Pelibatan masyarakat hanya sebatas inisiatif swadaya berupa gotong royong membersihkan pinggiran sungai, tanpa dukungan maupun arahan langsung dari pemerintah. Sayuti menilai seharusnya pemerintah menyediakan sarana pendukung seperti tempat pembuangan sampah agar masyarakat tidak lagi menjadikan sungai sebagai lokasi pembuangan. Dengan adanya dukungan fasilitas dan contoh nyata dari pemerintah,

masyarakat diyakini akan lebih aktif dan terarah dalam menjaga kebersihan sungai.<sup>79</sup>

Dari wawancara dengan Bapak Sayuti, dapat disimpulkan bahwa penanganan banjir di kawasan Sungai Jinga masih jauh dari optimal. Tidak ada perencanaan maupun program yang tersosialisasi, pemeliharaan sungai hanya mengandalkan gotong royong, pembangunan infrastruktur pengendali banjir tidak terlihat, monitoring dan evaluasi minim, serta pelibatan masyarakat masih sangat terbatas. Bapak Sayuti menekankan pentingnya penyediaan fasilitas pembuangan sampah dan upaya nyata dari pemerintah sebagai langkah awal dalam mengurangi pendangkalan sungai yang menjadi penyebab utama genangan banjir di wilayahnya.

### i. **Informan Kesembilan**

Nama	:	Muhammad Gunawan
Umur	:	21 tahun
Pendidikan	:	S1 Hukum Tata Negara
Pekerjaan	:	Mahasiswa aktif
Alamat	:	Jalan Kelayan B

Menurut Gunawan, program drainase yang jelas dan sistematis dari PUPR masih jarang ia dengar. Ia mengapresiasi langkah pemerintah membangun drainase sepanjang sekitar 800 meter di Jalan Perdagangan, Cempaka Raya, dan Dharma Praja, dengan alokasi anggaran sebesar sekitar Rp13 miliar, karena merupakan upaya nyata mengantisipasi banjir

---

<sup>79</sup> Sayuti, "Wawancara Pribadi," 15 Agustus 2025, Jalan Sungai Jingah.

rob dan genangan rutin. Namun, pengetahuan masyarakat umum tentang perencanaan ini masih sangat terbatas.

Gunawan mengamati bahwa Pasukan Turbo PUPR rutin melakukan pembersihan drainase tidak hanya di daerah protokol, tetapi juga di lokasi seperti Jalan Sultan Adam dengan pengerukan lumpur dan sampah sebagai bentuk pemeliharaan regular. Atas perannya sebagai pengamat lingkungan lokal, ia mencatat bahwa kegiatan ini efektif untuk ekosistem drainase, meskipun keterlibatan masyarakat masih bisa ditingkatkan.

Mahasiswa tersebut menyoroti survei awal yang dilakukan tim Bidang Drainase di lokasi seperti Simpang Telawang, sebagai bagian dari tahap persiapan pembangunan drainase baru pertanda bahwa PUPR tidak hanya membangun, tetapi juga melakukan perencanaan teknis awal. Kegiatan ini memberikan harapan bahwa infrastruktur drainase ke depan akan lebih tepat lokasi dan efektif.

Gunawan menyebut bahwa meskipun data internal PUPR tentang drainase tersedia, akses publik sangat terbatas. Ia berharap adanya lebih banyak transparansi, seperti portal data atau laporan rutin yang bisa diakses mahasiswa dan Masyarakat terutama terkait drainase dan titik rawan banjir untuk mendukung analisis akademis dan meningkatkan akuntabilitas.

Gunawan menyambut baik inisiatif gotong royong dan sosialisasi dari pihak pemerintah. Namun, ia menilai bahwa peran masyarakat

sebaiknya ditingkatkan secara struktural, misalnya dengan turut dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan kebersihan drainase, terutama di lingkungan sekitar kampus atau gang lokal. Keberadaan program yang lebih edukatif akan memperkuat partisipasi jangka panjang.<sup>80</sup>

Dari wawancara ini, terlihat bahwa mahasiswa seperti Muhammad Gunawan memberi perspektif kritis namun konstruktif terhadap kinerja drainase PUPR Kota Banjarmasin. Dia mengapresiasi langkah seperti pelebaran drainase dan proyek besar di Jalan Perdagangan dan Cempaka Raya, serta pemeliharaan rutin oleh Pasukan Turbo. Namun, ia juga menyoroti pentingnya transparansi data, pelibatan masyarakat akademis, dan pendekatan partisipatif dalam memperkuat efektivitas program.

#### **j. Informan Kesepuluh**

Nama	:	Riska Amelda
Umur	:	21 tahun
Pendidikan Terakhir	:	S1 Administrasi Publik
Pekerjaan	:	Mahasiswa Aktif
Alamat	:	Jalan Sungai Lulut

Riska menyoroti bahwa walau ia tidak mengetahui detail program drainase PUPR, namun ada harapan besar terhadap proyek besar seperti revitalisasi Sungai Veteran bagian dari program NUFReP. Ia menyadari bahwa proyek tersebut merupakan upaya sistematis pemerintah dalam mengendalikan banjir kota, meskipun sebagian masyarakat menyebut ada

---

<sup>80</sup> Muhammad Gunawan, “Wawancara Pribadi,” 15 Agustus 2025, Jalan Kelayan A, Gang Antasari.

perihal mempersempit sungai yang dapat memicu dampak lain. Baginya, perencanaan publik seperti ini penting demi mencegah luapan air yang melanda kawasan perkotaan.

Riska mengamati bahwa PUPR secara berkala melakukan pembersihan drainase di Sungai Andai, seperti yang terekam dalam media sosial mereka. Namun, efektivitas kegiatan tersebut masih terganggu oleh perilaku warga yang membuang sampah sembarangan ke saluran drainase yang hanya akan kembali menyumbat aliran jika tidak diiringi edukasi masyarakat. Jadi, meskipun pemeliharaan fisik ada, keberlanjutan fungsinya dipengaruhi oleh partisipasi warga.

Walau tidak melihat langsung pembangunan serupa di wilayahnya, Riska menyambut baik survei dan rencana teknis yang dilakukan PUPR di banyak lokasi strategis, termasuk Simpang Telawang, sebagai indikasi bahwa pembangunan drainase berjalan sesuai tahapan perencanaan. Proyek Sungai Veteran juga menjadi simbol ambisi perbaikan infrastruktur banjir meski tetap perlu keseimbangan antara teknis dan kesadaran lokal.

Menurut Riska, publikasi kegiatan PUPR di media sosial seperti proyek Survei Simpang Telawang maupun pembersihan drainase menunjukkan adanya transparansi. Namun, laporan mendalam seperti data debit air, titik rawan banjir, dan timeline perawatan drainase masih belum terlihat terbuka untuk umum. Informasi seperti itu sangat diperlukan agar masyarakat bisa memantau efektivitas program secara *real time*.

Riska menyampaikan harapannya agar program PUPR tidak hanya fokus pada pekerjaan fisik, seperti pembersihan drainase oleh Pasukan Turbo, tetapi juga memperkuat gerakan partisipatif. Misalnya, pelibatan komunitas lokal dan media kampus dalam kegiatan edukasi dan pengawasan lingkungan. Ini akan menjadikan program lebih berakar dan berkelanjutan.<sup>81</sup>

Wawancara dengan Riska Amelda memperkaya perspektif terhadap kinerja PUPR Kota Banjarmasin dalam hal drainase. Masyarakat melihat kemajuan di sisi perawatan, survei, dan proyek besar seperti Sungai Veteran, namun masih menantikan keterbukaan data, edukasi warga, serta integrasi antara infrastruktur dan partisipasi masyarakat agar pengendalian banjir efektif dan berkelanjutan.

#### **k. Informan Kesebelas**

Nama	: Ahmad Basir
Umur	: 50 tahun
Pendidikan Terakhir	: D3
Pekerjaan	: Ketua RT
Alamat	: Jalan Pemurus Dalam, RT 05, RW 03

Bapak Ahmad mengamati bahwa sepanjang tinggal di Jalan Pemurus Dalam, ia belum melihat program pengendalian banjir yang terstruktur dari PUPR Kota Banjarmasin. Meski ada kabar dari DPRD bahwa drainase di Kecamatan Banjarmasin Selatan akan dibenahi karena

---

<sup>81</sup> Riska Amelda, "Wawancara Pribadi," 18 Agustus 2025, Jalan Sungai Lulut.

tak berfungsi baik, ia belum merasakan efek nyata di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini membuat masyarakat setempat menilai bahwa perencanaan belum menyasar wilayah mereka.

Warga, termasuk Bapak Ahmad, biasanya bergotong royong membersihkan drainase lokal. Namun menurutnya, pembersihan dari pihak PUPR seperti pengeringan atau penyedotan sedimen jarang terjadi. Ia hanya mengetahui usaha normalisasi sungai dan pengeringan di wilayah Pemurus dilakukan setelah banjir cukup parah. Kurangnya pemeliharaan teratur menyebabkan genangan di sana bisa berlangsung berminggu-minggu setelah hujan lebat dan pasang tinggi.

Bapak Ahmad menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur seperti drainase modern sudah dilakukan di Jalan Lambung Mangkurat dan tiga titik rawan di Banjarmasin lainnya (Dharma Praja, Cempaka Raya, Perdagangan), dengan anggaran sekitar Rp3 miliar dan Rp7,2 miliar untuk rancangan trotoar dan drainase baru. Namun, hal tersebut belum menjangkau wilayah Pemurus sehingga warga masih berharap agar PUPR memperluas cakupan pembangunan infrastrukturnya.

Menurut Bapak Ahmad, dia jarang melihat koordinasi atau evaluasi langsung dari PUPR atau BPBD pasca-program. Masyarakat hanya bisa melihat liputan media tentang proyek drainase di protokol kota, namun tidak ada laporan atau feedback rinci tentang kondisi drainase di lingkungannya. Warga berharap PUPR membuka kanal informasi agar

masyarakat mengetahui progres dan jadwal pemeliharaan drainase di wilayah mereka.

Bapak Ahmad mencermati adanya himbauan gotong royong dari kelurahan untuk membersihkan drainase saat banjir mulai melanda, tetapi tidak ada pendekatan yang melibatkan warga dalam plan aksi mitigasi secara rutin. Ia menyarankan agar PUPR mengajak komunitas lokal, seperti RT/RW, atau sekolah setempat, untuk ikut serta menjaga drainase dan menekan sampah di saluran. Program seperti ini dapat memperkuat efektivitas tindakan teknis dan mendorong kepedulian warga terhadap kebersihan saluran.<sup>82</sup>

Wawancara dengan Bapak Ahmad Basir menegaskan bahwa wilayah Pemurus Dalam sangat memerlukan intervensi nyata dari PUPR. Masyarakat setempat merasakan kinerja drainase masih lemah dari segi pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur. Adanya kanal komunikasi publik, perluasan cakupan proyek drainase, dan pelibatan warga secara sistematis perlu diperkuat agar efektivitas penanganan banjir dapat meningkat.

## I. Informan Keduabelas

Nama	: Adi Nugroho
Umur	: 23 tahun
Pendidikan	: Mahasiswa S1 Teknik Sipil
Pekerjaan	: Mahasiswa aktif

---

<sup>82</sup> Ahmad Basir, "Wawancara Pribadi," 18 Agustus 2025, Jalan Pemurus Dalam.

Alamat : Jl. MT. Haryono

Adi menyampaikan bahwa wilayahnya kini jauh lebih baik setelah proyek rehabilitasi drainase oleh PUPR sebagaimana diberitakan bahwa PUPR membenahi tiga titik rawan banjir, termasuk Jalan Lambung Mangkurat, dengan alokasi Rp 7,2 miliar untuk drainase dan trotoar modern. Dari sudut teknik, ia menilai bahwa program tersebut mencerminkan perencanaan yang matang, dengan desain drainase yang meningkatkan kapasitas aliran air serta layak secara struktural.

Adi memantau adanya kegiatan pemeliharaan oleh Pasukan Turbo PUPR pembersihan drainase di Jalan Lambung Mangkurat yang digelar secara berkala melalui pengeringan dan pengangkutan lumpur & sampah, sesuai dokumentasi di akun resmi Instagram PUPR. Bagi seorang mahasiswa teknik, pemeliharaan rutin ini sangat penting untuk menjaga fungsi drainase pasca-rehabilitasi, dan ia mengapresiasi konsistensinya meski tidak selalu terlihat oleh masyarakat umum.

Adi menggarisbawahi bahwa rehabilitasi di Lambung Mangkurat merupakan contoh implementasi efektif dari pembangunan infrastruktur yang diwujudkan dalam bentuk drainase yang lebih lebar, terintegrasi dengan trotoar modern sesuai desain kota berkelanjutan. Ia mencatat bahwa proyek ini memenuhi kriteria konstruksi yang mendukung pengendalian banjir kota, sekaligus meningkatkan estetika kawasan.

Adi menyayangkan minimnya akses publik terhadap data teknis seperti kapasitas muatan drainase, waktu surut genangan, atau catatan

rawan banjir pasca-pembangunan. Sebagai mahasiswa teknik, dia menghargai upaya PUPR menampilkan proyek di media sosial dan situs resmi, tetapi berharap agar data lebih sistematik dibuka misalnya dalam bentuk laporan teknis atau laporan evaluasi yang dapat dijadikan bahan analisis oleh akademisi dan masyarakat.

Adi merasa wilayahnya belum pernah mendapatkan pelibatan masyarakat dalam bentuk teknis, seperti pelatihan pemeliharaan drainase atau edukasi sistem hidraulika dasar. Padahal, sebagai warga pendidikan teknik, ia melihat peluang besar untuk mengintegrasikan komunitas lokal seperti mahasiswa dan RT/RW setempat dalam menjaga drainase dan memantau kerusakan di awal. Ini bisa menjadi model pelibatan masyarakat yang lebih fungsional dan berkelanjutan.<sup>83</sup>

Wawancara dengan Adi Nugroho menyoroti bahwa proyek rehabilitasi drainase di Jalan Lambung Mangkurat telah meningkatkan kualitas infrastruktur banjir di wilayah tersebut mencerminkan kinerja PUPR yang sesuai dalam hal perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan teknis. Namun, aspek monitoring data dan pelibatan masyarakat masih memiliki ruang pengembangan. Apabila PUPR membuka data teknis dan melibatkan warga secara sistemik, akan memperkuat keberlanjutan fungsi drainase pasca-pembangunan.

---

<sup>83</sup> Adi Nugroho, “Wawancara Pribadi.”

### **m. Informan Ketigabelas**

Nama	: Refli Hernata
Umur	: 50 tahun
Pendidikan Terakhir	: SMA
Pekerjaan	: Ketua RT
Alamat	: Tanjung Pagar

Bapak Refli mencatat bahwa banjir rob yang melanda lima kelurahan Tanjung Pagar, Pemurus Dalam, Pemurus Luar, Pemurus Baru, dan Sungai Lulut pada awal tahun 2025 terjadi karena sungai dan drainase tersumbat ilung (eceng gondok) dan sampah, yang menyebabkan aliran air tidak efektif saat pasang laut. Sementara itu, program perencanaan pengendalian banjir di tingkat lingkungan seperti ini belum terlihat jelas, karena ia belum mendengar adanya sosialisasi atau peta rawan banjir dari PUPR.

Menurut Refli, setelah rob terjadi, PUPR langsung menurunkan Pasukan Turbo untuk melakukan pembersihan saluran dan penggerukan sedimen di sungai-sungai kecil dan drainase lokal. Ia merasakan secara langsung bahwa air mulai surut dalam waktu singkat setelah pembersihan tersebut. Ia menyebut bahwa keberadaan Pasukan Turbo menunjukkan respons cepat pemerintah terhadap kondisi rob meski tindakan ini bersifat remedial bukan preventif.

Bapak Refli mengungkapkan bahwa selain pembersihan pasca-rob, ia belum melihat adanya pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur

seperti konstruksi siring, peninggian tanggul, atau normalisasi sungai di lingkungannya. Ia berharap PUPR bisa mengambil langkah lanjutan setelah pembersihan, seperti memperdalam saluran atau memperbaiki struktur penahan air agar serangan rob berikutnya tidak berdampak parah.

Dalam hal monitoring pasca-rob, Refli menyampaikan bahwa dirinya hanya mendengar laporan BPBD bahwa PUPR sedang memverifikasi sumber sumbatan dan menyiapkan surat ke kelurahan agar tindakan dilanjutkan. Namun ia tidak melihat mekanisme formal atau publikasi data mengenai titik rawan, kondisi drainase, atau jadwal pemeliharaan yang bisa membantu warga berlakukan antisipasi lebih awal.

Bapak Refli merasa pelibatan masyarakat dalam penanggulangan rob masih sebatas membersihkan sungai pasca kejadian. Tidak ada pelatihan atau edukasi rutin dari PUPR maupun BPBD. Ia berharap adanya program pelibatan warga seperti gotong royong terpola, monitoring komunitas terhadap kondisi sungai, dan kesadaran massal untuk mencegah penumpukan sampah dan ilung.<sup>84</sup>

Wawancara dengan Bapak Refli Hernata memperlihatkan bahwa kinerja Pasukan Turbo PUPR dirasakan efektif dalam meredam krisis rob secara cepat. Namun, dari sisi stabilitas jangka panjang, masih terdapat kekurangan pada aspek perencanaan preventif, pembangunan infrastruktur tahan rob, mekanisme monitoring melibatkan warga, serta pemberdayaan masyarakat untuk menjaga drainase dan sungai. Penanganan banjir rob

---

<sup>84</sup> Refli Hernata, "Wawancara Pribadi," 18 Agustus 2025, Pemurus Dalam.

perlu disertai strategi yang lebih holistik dan berkelanjutan berdasarkan kelima indikator kinerja PUPR.

#### **n. Informan Keempatbelas**

Nama	: Ayu Pratiwi
Umur	: 22 tahun
Pendidikan	: Mahasiswi S1 Teknik Sipil
Pekerjaan	: Mahasiswa aktif,
Alamat	: Jl. HKSN

Ayu menjelaskan bahwa pembangunan Rumah Pompa dan Pintu Air di Sungai Belasung merupakan terobosan teknis penting dalam mitigasi banjir rob. Proyek ini dibangun dengan anggaran sekitar Rp 5 miliar dan dirancang untuk mengendalikan pasang air laut yang sering menggenangi jalan utama sekitar seperti Lambung Mangkurat dan MT Haryono. Ia menilai proyek ini menunjukkan bahwa PUPR telah melakukan perencanaan berbasis kebutuhan kota yang rawan banjir rob.

Menurut Ayu, meski pembangunan fisiknya sudah selesai terutama perangkat pintu air dan pompa pemeliharaan rutin seperti uji coba dan penjagaan sistem masih perlu diinformasikan secara publik. Ia mencatat bahwa uji coba telah dilakukan saat air pasang, menggunakan *peilschaal* sebagai indikator untuk menyalakan pompa. Namun, dia berharap adanya jadwal pemeliharaan dan monitoring yang lebih terstruktur agar sistem ini tetap andal sepanjang tahun.

Ayu menghargai bahwa pembangunan rumah pompa ini merupakan sistem pengendalian banjir pertama di Banjarmasin, dan akan diperluas ke lokasi lain seperti Sungai Veteran, Bilu, dan Gardu. Ia menilai desain pompa dengan kapasitas 1.000 liter/detik dan daya hisap yang kuat (sekitar 157 kVA) sangat tepat secara teknis untuk menangani volume air rob yang tinggi.

Ayu menyoroti pentingnya data teknis sebagai bahan evaluasi. Ia mengapresiasi informasi mengenai uji coba pompa dan progres listrik yang sudah terpasang, namun berharap data terkait kinerja pompa (seperti berapa banyak genangan yang berhasil dikendalikan) juga dibuka untuk masyarakat. Hal ini penting sebagai acuan evaluasi keberhasilan program dan transparansi pemerintah.

Sebagai mahasiswa teknik, Ayu mengusulkan agar PUPR mengajak komunitas akademik dan warga sekitar dalam proses pemantauan dan edukasi misalnya simulasi uji coba pompa saat pasang tinggi untuk pelajar teknik, agar masyarakat lebih memahami fungsi dan manfaat pompa. Pelibatan ini menurutnya akan memperkuat keberlanjutan sistem dan memupuk rasa kepemilikan kolektif terhadap infrastruktur penanggulangan banjir.<sup>85</sup>

Menurut Ayu Pratiwi, fasilitas Rumah Pompa Sungai Belasung adalah langkah maju yang nyata dari pihak PUPR dalam mengatasi banjir rob menunjukkan perencanaan teknis, pembangunan menghadapi

---

<sup>85</sup> Ayu Pratiwi, "Wawancara Pribadi," 18 Agustus 2025, Jl. HKSN.

tantangan operasional, dan kesiapan infrastruktur. Namun, untuk menjadikan sistem ini efektif dan berkelanjutan, perlu ditambah transparansi data, perawatan jangka panjang, serta pelibatan aktif Masyarakat khususnya komunitas teknik dan akademik dalam setiap tahap evaluasi dan simulasi.

## 2. Matrik

**Tabel 4. 1 Matriks Hasil Penelitian**

No	Narasumber	Perencanaan & Program	Pemeliharaan	Pembangunan & Rehabilitasi	Monitoring & Evaluasi	Pelibatan Masyarakat
1.	Sholikin (Bidang Sungai)	Program pengendalian sungai ada, tapi terkendala pendanaan	Pemeliharaan sungai jarang, pengerukan terakhir 2021	Pengerukan sungai jarang dilakukan	Evaluasi lemah, data pengerukan tidak jelas	Warga dilibatkan gotong royong
2.	Faiz (Bidang Drainase)	Ada perencanaan drainase, namun prioritas terbatas	Pemeliharaan drainase ada, tapi tidak rutin	Beberapa drainase sudah dibangun tapi terbatas	Belum ada data evaluasi terbuka	Warga dilibatkan terbatas
3.	Andi Putra (BPBD)	mendukung program PUPR, koordinasi lintas instansi	Pemeliharaan dilakukan saat banjir darurat	Fokus pada tanggap darurat, pembangunan terbatas	Evaluasi hanya saat banjir besar	Masyarakat dilibatkan mitigasi
4.	Hanafi (BPBD)	Mitigasi berbasis perencanaan darurat, dukungan PUPR dibutuhkan	Monitoring banjir ada, tapi terbatas	Hanya dukungan jangka pendek, infrastruktur kurang	Butuh data banjir lebih detail	Masyarakat dilibatkan mitigasi
5.	Muhammad Nur	Belum ada program	Tidak ada pemeliharaan	Tidak ada pembangunan	Monitoring tidak ada	Hanya gotong

	(Kelayan A)	signifikan, hanya bantuan sosial dari dinas lain	sungai rutin	baru		royong kebersihan hasil inisiatif warga
6.	Idijar Yanuar Nor (Seberang Mesjid)	Usulan melalui musrenbang & DPRD, tapi realisasi lambat	Normalisasi sungai terakhir 2022, drainase ditolak warga	Usul pembatas jalan/siring, jalan cepat rusak	Usulan selalu diulang tiap tahun, evaluasi minim	Musrenbang & RW/RT dilibatkan
7.	Rahmawati (Sungai Andai)	Tidak mengetahui program, hanya melihat pasca banjir ada pembersihan	Pembersihan sekali pasca banjir, tidak rutin	Tidak ada pembangunan drainase signifikan	Tidak ada evaluasi yang terlihat	Gotong royong pembersihan kecil
8.	Sayuti (Sungai Jingah)	Tidak ada program khusus, hanya antisipasi saat pasang	Gotong royong warga, tapi tanpa PUPR	Belum ada pembangunan	Antisipasi musiman, tanpa evaluasi resmi	Gotong royong sampah oleh warga
9.	Muhammad Gunawan (Kelayan B)	PUPR sudah lakukan program drainase, namun butuh transparansi	Pemeliharaan drainase perlu monitoring rutin	Drainase dibangun tapi butuh evaluasi hasil	Butuh transparansi data drainase	Mahasiswa ingin dilibatkan pemantauan
10.	Riska Amelda (Sungai Lulut)	Program drainase belum merata, ada proyek sungai Veteran	Pemeliharaan drainase sporadis, proyek sungai	Drainase belum optimal, proyek sungai Veteran jadi	Butuh evaluasi proyek Veteran	Warga harap lebih diberdayakan

			perlu perhatian	sorotan		
11.	Ahmad Basir ( Pemurus Dalam)	Drainase sering bermasalah, minim program rehabilitasi	Drainase tidak terawat, sering mampet	Drainase tidak direhabilitasi meski sering banjir	Monitoring drainase tidak jelas	Masyarakat tidak banyak terlibat
12.	Adi Nugroho ( Jl. MT. Haryono)	Rehabilitasi drainase berjalan baik, perencanaan dianggap tepat	Pemeliharaan pasca rehabilitasi berjalan baik	Rehabilitasi drainase berhasil, aliran lancar	Data kinerja drainase rehabilitasi baik	Warga puas hasil rehabilitasi, masih terlibat menjaga
13.	Refli Hernata (Tanjung Pagar)	Program pasukan turbo berhasil tangani sedimentasi sungai	Pasukan turbo rutin keruk sedimentasi	Pasukan turbo berhasil membuka aliran sungai mati	Pasukan turbo terbukti efektif	Pasukan turbo berdampak langsung pada warga
14.	Ayu Pratiwi (HKSN)	Rumah pompa Belasung bukti perencanaan PUPR berbasis kebutuhan rob	Pompa diuji coba saat pasang, butuh pemeliharaan terstruktur	Rumah pompa baru, kapasitas 1.000 liter /detik	Evaluasi pompa perlu data teknis terbuka	Mahasiswa ingin simulasi pompa dengan warga

## C. Analisis Data

### 1. Efektivitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin Dalam Menangani Banjir di Kota Banjarmasin Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Diatur dalam Perwali No. 58 Tahun 2022

#### a. Indikator 1: Perencanaan dan Program Pengendalian Banjir

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Bidang Sungai dan Drainase Dinas PUPR Kota Banjarmasin, perencanaan program pengendalian banjir difokuskan pada penyusunan *master plan* drainase, normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi, serta rehabilitasi jaringan drainase perkotaan. Perencanaan ini dilaksanakan dengan merujuk pada Perwali No. 58 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas PUPR, di mana bidang sungai dan drainase diberi kewenangan dalam menyusun kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air.

Jika dianalisis melalui Teori Efektivitas Kinerja Organisasi menurut Gibson, Donnelly, dan Ivancevich, maka perencanaan tersebut dapat dinilai dari tiga aspek utama: tujuan, sumber daya, dan proses. Dari segi tujuan, Dinas PUPR telah menunjukkan adanya target yang jelas, yaitu mengurangi titik banjir di kawasan rawan seperti Kecamatan Banjarmasin Timur dan Selatan. Namun dari sisi sumber daya, keterbatasan anggaran dan peralatan teknis membuat implementasi belum sebanding dengan kebutuhan. Sedangkan pada aspek proses, meskipun Dinas PUPR telah melibatkan *stakeholder* seperti camat, lurah, dan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang),

namun koordinasi antarlembaga masih belum optimal, terutama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan instansi terkait pengelolaan lingkungan.

Sementara itu, dengan teori manajemen bencana dari Nick Carter, perencanaan pengendalian banjir merupakan tahap mitigasi yang krusial untuk mengurangi risiko bencana. Nick Carter menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan teknis dan kesiapsiagaan masyarakat. Dalam konteks ini, Dinas PUPR sudah berupaya menyusun dokumen perencanaan teknis seperti *Drainase Master Plan* dan Rencana Induk Pengendalian Banjir. Namun kelemahan masih terdapat pada aspek partisipasi masyarakat, di mana sebagian besar warga hanya dilibatkan secara pasif, yaitu sebatas penyampaian aspirasi saat Musrenbang, tanpa keterlibatan lebih lanjut dalam pengawasan pelaksanaan program. Dengan demikian, efektivitas perencanaan dan program pengendalian banjir dapat dikatakan sudah berjalan namun belum maksimal. Dari perspektif teori kinerja organisasi, kelemahan ada pada aspek sumber daya dan koordinasi lintas sektor. Sedangkan dari perspektif manajemen bencana, tantangan terbesar adalah minimnya integrasi antara perencanaan teknis dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif serta dukungan anggaran yang memadai agar perencanaan pengendalian banjir benar-benar efektif dan berkelanjutan.

b. Indikator 2: Pemeliharaan Sungai dan Drainase secara Rutin

Pemeliharaan sungai dan drainase merupakan salah satu tugas pokok Bidang Sungai dan Drainase Dinas PUPR Kota Banjarmasin sesuai Perwali No. 58 Tahun 2022. Data lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan dilakukan melalui penggerukan sedimentasi, pembersihan sampah, perbaikan saluran rusak, dan pengawasan titik rawan sumbatan. Program ini dilakukan secara berkala, khususnya menjelang musim hujan. Namun, hasil wawancara dengan petugas lapangan menunjukkan bahwa frekuensi pemeliharaan masih bergantung pada ketersediaan anggaran dan personel, sehingga tidak semua wilayah dapat terlayani secara rutin.

Jika dianalisis dengan Teori Efektivitas Kinerja Organisasi (Gibson, Donnelly, dan Ivancevich), indikator pemeliharaan ini mencerminkan sejauh mana Dinas PUPR mampu mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan banjir. Dari sisi produktivitas, kegiatan penggerukan dan pembersihan saluran memang memberikan hasil nyata dengan berkurangnya genangan di beberapa titik. Namun, dari aspek efisiensi, pemeliharaan masih menghadapi kendala karena armada alat berat terbatas dan jumlah tenaga teknis yang minim dibanding luas wilayah Kota Banjarmasin. Hal ini berdampak pada keberlangsungan pemeliharaan yang belum merata. Dari sisi kepuasan masyarakat, banyak warga mengapresiasi upaya Dinas PUPR, namun keluhan tetap muncul akibat masih adanya saluran tersumbat di daerah padat penduduk seperti Kelurahan Kelayan dan Sungai Andai.

Sementara itu, menurut Teori Manajemen Bencana Nick Carter, tahap pemeliharaan merupakan bagian dari strategi mitigasi struktural. Nick Carter menekankan pentingnya pemeliharaan rutin untuk mengurangi kerentanan fisik terhadap bencana. Dalam konteks ini, meskipun Dinas PUPR telah melaksanakan kegiatan rutin, efektivitasnya masih terbatas karena sistem pengelolaan sampah masyarakat yang kurang baik. Banyak drainase kembali tersumbat akibat perilaku warga membuang sampah sembarangan. Artinya, pemeliharaan teknis tanpa diikuti perubahan perilaku masyarakat hanya akan menghasilkan efektivitas sementara.

Dengan demikian, efektivitas pemeliharaan sungai dan drainase secara rutin sudah sesuai mandat regulasi, namun belum maksimal. Berdasarkan teori kinerja organisasi, kelemahan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan. Sedangkan menurut teori manajemen bencana, keberhasilan pemeliharaan masih terhambat oleh faktor eksternal berupa rendahnya kesadaran masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya strategi terpadu antara pemeliharaan teknis dan edukasi publik agar hasil yang dicapai lebih berkelanjutan.

c. Indikator 3: Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pengendalian

#### Banjir

Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir merupakan strategi teknis utama Dinas PUPR Kota Banjarmasin dalam menekan titik genangan. Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara, kegiatan ini mencakup pembangunan kolam retensi, perbaikan pintu air,

peninggian tanggul di wilayah rawan luapan, serta rehabilitasi drainase primer dan sekunder yang sudah mengalami kerusakan. Selain itu, pemerintah kota juga melakukan pembangunan *box culvert* di kawasan padat penduduk sebagai upaya memperlancar aliran air hujan. Meskipun demikian, pembangunan dan rehabilitasi ini masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan anggaran, serta keterlambatan dalam pelaksanaan proyek akibat kendala teknis dan cuaca.

Menurut Teori Efektivitas Kinerja Organisasi (Gibson, Donnelly, dan Ivancevich), pembangunan dan rehabilitasi dapat dianalisis dari aspek pencapaian tujuan, efisiensi, dan adaptabilitas. Dari sisi tujuan, pembangunan infrastruktur seperti kolam retensi terbukti mampu menampung limpahan air hujan sehingga mengurangi genangan. Namun, dari sisi efisiensi, pelaksanaan seringkali terkendala perizinan lahan dan biaya konstruksi yang tinggi, sehingga hasil yang dicapai tidak selalu sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Dari aspek adaptabilitas, Dinas PUPR berusaha menyesuaikan pembangunan dengan kondisi geografis Banjarmasin yang mayoritas berupa rawa dan tanah gambut. Namun, karena karakteristik tanah yang labil, beberapa proyek rehabilitasi seperti perbaikan saluran drainase cepat mengalami kerusakan kembali.

Sementara itu, dalam perspektif Teori Manajemen Bencana Nick Carter, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur termasuk ke dalam strategi mitigasi struktural yang bersifat jangka panjang. Nick Carter menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berorientasi

pada pengurangan risiko, bukan hanya penanganan dampak banjir. Dalam konteks ini, meskipun Dinas PUPR telah berusaha membangun kolam retensi dan pintu air, kelemahan masih terlihat pada integrasi antara pembangunan infrastruktur dan strategi nonstruktural, seperti pengendalian tata ruang serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan lahan. Akibatnya, infrastruktur yang dibangun seringkali tidak bekerja optimal karena masih ada masyarakat yang menutup saluran atau membangun di sempadan sungai.

Dengan demikian, efektivitas pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir sudah berjalan, namun belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan teori efektivitas organisasi, kendala utama terletak pada keterbatasan anggaran, lahan, dan daya tahan konstruksi. Sedangkan menurut teori manajemen bencana, kelemahan terletak pada kurangnya integrasi antara strategi struktural dan non-struktural. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pembangunan infrastruktur, kebijakan tata ruang, dan perubahan perilaku masyarakat untuk menciptakan pencegahan banjir yang berkelanjutan.

#### d. Indikator 4: Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Banjir

Monitoring dan evaluasi merupakan tahapan penting untuk menilai sejauh mana program pengendalian banjir yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Banjarmasin berjalan efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Bidang Sungai dan Drainase, monitoring dilakukan melalui inspeksi lapangan secara berkala, pengawasan terhadap proyek

pembangunan maupun rehabilitasi, serta pengumpulan data laporan masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan menilai capaian program, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi seringkali masih bersifat formalitas, lebih menekankan pada laporan administratif dibandingkan evaluasi mendalam mengenai efektivitas penanganan banjir.

Menurut Teori Efektivitas Kinerja Organisasi (Gibson, Donnelly, dan Ivancevich), monitoring dan evaluasi dapat dilihat dari indikator produktivitas, kualitas, dan kepuasan publik. Dari sisi produktivitas, Dinas PUPR telah berusaha melakukan pengawasan rutin terhadap proyek penggerukan dan pembangunan drainase. Namun, dari sisi kualitas, hasil monitoring belum sepenuhnya berdampak signifikan karena masih ditemukan drainase yang cepat kembali tersumbat akibat minimnya tindak lanjut pasca-evaluasi. Dari sisi kepuasan publik, sebagian masyarakat menyampaikan bahwa keluhan terkait genangan air sudah ditindaklanjuti, tetapi lambatnya proses respons membuat masyarakat merasa hasil evaluasi belum sepenuhnya efektif.

Sementara itu, dalam perspektif Teori Manajemen Bencana Nick Carter, monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari siklus manajemen risiko bencana yang berfungsi untuk memperbaiki kelemahan dalam tahap mitigasi. Nick Carter menekankan bahwa evaluasi bukan hanya sekadar mengukur capaian fisik, melainkan juga menilai kesiapan masyarakat dan

keberlanjutan program. Dalam konteks Banjarmasin, monitoring lebih banyak menyoroti aspek teknis, sementara aspek non-teknis seperti keterlibatan warga dalam menjaga kebersihan drainase atau kepatuhan terhadap tata ruang belum menjadi fokus evaluasi. Akibatnya, program pengendalian banjir sering kali hanya dinilai dari keluaran (*output*) proyek, bukan dari dampak jangka panjang terhadap pengurangan risiko banjir.

Dengan demikian, efektivitas monitoring dan evaluasi program pengendalian banjir di Kota Banjarmasin sudah berjalan namun masih kurang optimal. Berdasarkan teori efektivitas organisasi, kelemahan utama ada pada tindak lanjut pascamonitoring yang belum maksimal. Sedangkan menurut teori manajemen bencana, evaluasi masih terlalu fokus pada aspek teknis dan belum mengintegrasikan partisipasi masyarakat serta faktor tata ruang. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme evaluasi berbasis dampak (*impact evaluation*), serta peningkatan transparansi hasil monitoring agar masyarakat dapat ikut mengawasi dan mendorong peningkatan kualitas kinerja Dinas PUPR.

e. Indikator 5: Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Banjir

Pelibatan masyarakat merupakan aspek penting dalam pencegahan banjir di Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas PUPR Kota Banjarmasin telah berupaya melibatkan masyarakat melalui program gotong royong pembersihan drainase lingkungan, sosialisasi mengenai bahaya membuang sampah sembarangan, hingga pelibatan kelompok

masyarakat dalam pemeliharaan saluran kecil di lingkungan permukiman. Selain itu, pemerintah kota juga mengadakan forum komunikasi dengan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi titik rawan banjir. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih fluktuatif: tinggi pada saat pasca banjir, tetapi menurun saat kondisi cuaca relatif aman.

Dalam perspektif Teori Efektivitas Kinerja Organisasi (Gibson, Donnelly, dan Ivancevich), partisipasi masyarakat dapat meningkatkan produktivitas organisasi karena beban kerja teknis Dinas PUPR dapat terbantu dengan kontribusi masyarakat. Dari sisi kualitas, pelibatan warga mendukung keberlangsungan program pencegahan banjir, sebab drainase yang dipelihara bersama akan lebih terjaga. Namun, dari sisi kepuasan publik, masih ada warga yang menganggap bahwa pengendalian banjir sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, sehingga keterlibatan mereka bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kinerja Dinas PUPR dalam aspek partisipasi sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan sikap masyarakat.

Sementara itu, menurut Teori Manajemen Bencana Nick Carter, partisipasi masyarakat adalah bagian dari mitigasi nonstruktural yang menekankan keterlibatan sosial dalam mengurangi risiko bencana. Carter menegaskan bahwa keberhasilan strategi mitigasi sangat ditentukan oleh kesiapan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Dalam konteks Banjarmasin, upaya pelibatan masyarakat masih menghadapi tantangan berupa budaya membuang sampah ke sungai, rendahnya kepatuhan

terhadap aturan sempadan sungai, serta minimnya kader lingkungan di tingkat RT/RW. Artinya, meskipun ada partisipasi, efektivitasnya belum sepenuhnya mendukung upaya pencegahan banjir secara jangka panjang.

Dengan demikian, efektivitas pelibatan masyarakat dalam pencegahan banjir di Kota Banjarmasin sudah menunjukkan arah positif, tetapi belum konsisten. Berdasarkan teori efektivitas organisasi, kelemahan terletak pada rendahnya kesadaran publik yang membuat kontribusi masyarakat tidak berkelanjutan. Sedangkan menurut teori manajemen bencana, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya menjadi budaya mitigasi yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan peran masyarakat melalui edukasi berkelanjutan, pemberdayaan kader lingkungan, serta insentif partisipasi agar pencegahan banjir tidak hanya bergantung pada upaya teknis pemerintah, melainkan juga pada kesadaran kolektif warga.

## **2. Kendala Yang dihadapi PUPR Kota Banjarmasin Dalam Melaksanakan Tugasnya Menangani Banjir di Kota Banjarmasin**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kendala yang dihadapi Dinas PUPR Kota Banjarmasin dalam menjalankan program pencegahan banjir. Kendala-kendala tersebut dapat dikelompokkan ke dalam aspek internal maupun eksternal.

### **a. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya**

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan anggaran daerah. Program pembangunan kolam retensi, peninggian tanggul, serta rehabilitasi drainase membutuhkan biaya yang besar. Anggaran yang

tersedia sering kali harus dibagi dengan program pembangunan infrastruktur lain seperti jalan dan jembatan. Selain itu, keterbatasan alat berat dan tenaga teknis menyebabkan pengerjaan proyek pengendalian banjir tidak bisa dilakukan secara simultan di semua titik rawan.

- 1) Dalam perspektif Teori Efektivitas Organisasi, keterbatasan sumber daya berdampak pada aspek efisiensi karena *input* yang terbatas membuat *output* tidak maksimal.
- 2) Sedangkan dalam Teori Manajemen Bencana Nick Carter, kondisi ini menunjukkan lemahnya kapasitas mitigasi struktural akibat keterbatasan investasi di bidang pengendalian banjir.

b. Kendala Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan

Perubahan tata ruang kota, terutama konversi lahan resapan menjadi permukiman atau kawasan komersial, memperparah kerentanan banjir. Walaupun Dinas PUPR telah melakukan pembangunan infrastruktur, derasnya arus urbanisasi membuat lahan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan semakin berkurang.

- 1) Menurut Teori Efektivitas Organisasi, kondisi ini menghambat pencapaian tujuan karena hasil kerja teknis PUPR sering kali tergerus oleh dampak kebijakan tata ruang yang tidak konsisten.
- 2) Sedangkan menurut Nick Carter, lemahnya sinergi antara perencanaan pembangunan dan mitigasi non-struktural memperbesar risiko bencana.

### c. Perilaku Masyarakat

Faktor eksternal lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat.

Masih banyak warga yang membuang sampah ke sungai dan menutup saluran drainase demi kepentingan pribadi. Kondisi ini membuat saluran cepat tersumbat meskipun sudah dikeruk atau diperbaiki.

- 1) Dalam Teori Efektivitas Organisasi, faktor ini memengaruhi kualitas hasil kerja karena intervensi teknis PUPR tidak akan bertahan lama jika tidak diimbangi oleh perilaku masyarakat yang mendukung.
- 2) Dalam Teori Manajemen Bencana, rendahnya kesadaran warga mencerminkan lemahnya mitigasi non-struktural. Carter menekankan bahwa keberhasilan pencegahan bencana sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat, bukan hanya intervensi teknis pemerintah.

### d. Kendala Teknis dan Alamiah

Kondisi geografis Banjarmasin yang berupa dataran rendah dan lahan rawa menjadi tantangan tersendiri. Banyak saluran drainase yang cepat mengalami penurunan tanah sehingga infrastruktur tidak bertahan lama. Selain itu, curah hujan yang tinggi dan pasang surut Sungai Barito juga memperburuk kondisi banjir.

- 1) Menurut Teori Efektivitas Organisasi, faktor alamiah ini sulit dikendalikan sehingga pencapaian tujuan sering kali tidak sepenuhnya sesuai rencana.

- 2) Sedangkan menurut Teori Manajemen Bencana, faktor ini masuk dalam kategori *hazard* yang memang tidak bisa dieliminasi, tetapi dapat diminimalkan dampaknya melalui strategi mitigasi yang lebih adaptif.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kendala utama Dinas PUPR Kota Banjarmasin dalam pencegahan banjir meliputi keterbatasan anggaran, lemahnya pengendalian tata ruang, rendahnya kesadaran masyarakat, serta faktor geografis dan alamiah. Berdasarkan Teori Efektivitas Organisasi, kendala ini memengaruhi efisiensi, kualitas, dan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan dalam perspektif Teori Manajemen Bencana Nick Carter, kendala tersebut menunjukkan lemahnya integrasi antara strategi mitigasi struktural dan nonstruktural. Dengan demikian, pencegahan banjir di Kota Banjarmasin membutuhkan solusi yang lebih komprehensif, mencakup peningkatan kapasitas anggaran, penegakan aturan tata ruang, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor.

Pertama, terkait dengan pelaksanaan pencegahan banjir, efektivitas kinerja Dinas PUPR dapat dinilai melalui lima indikator utama, yaitu perencanaan program, pemeliharaan drainase dan sungai, pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur, monitoring dan evaluasi, serta pelibatan masyarakat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perencanaan program pengendalian banjir sudah berjalan secara sistematis, namun keterbatasan anggaran menyebabkan banyak rencana yang belum terealisasi secara menyeluruh. Pemeliharaan sungai dan drainase dilakukan rutin, tetapi hasilnya belum

optimal karena masih sering tersumbat oleh sampah masyarakat. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur telah dilaksanakan, namun kualitas penggerjaan serta keterbatasan alat berat membuat hasilnya belum sepenuhnya efektif. Monitoring dan evaluasi program telah dilakukan, tetapi masih berorientasi pada administrasi dan belum menyentuh evaluasi berbasis dampak. Sementara itu, pelibatan masyarakat dalam pencegahan banjir mulai diterapkan, namun partisipasinya belum konsisten karena rendahnya kesadaran warga. Dengan demikian, efektivitas kinerja Dinas PUPR dalam pencegahan banjir tergolong cukup baik, namun masih terdapat sejumlah kelemahan yang mengurangi capaian optimal.

Kedua, terkait dengan kendala yang dihadapi Dinas PUPR, penelitian menemukan bahwa terdapat hambatan baik internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Sementara itu, kendala eksternal meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan drainase, alih fungsi lahan resapan menjadi permukiman, serta faktor geografis dan alamiah berupa kondisi dataran rendah, rawa, dan curah hujan tinggi yang memperbesar risiko banjir. Kendala-kendala tersebut menyebabkan upaya pencegahan banjir yang dilakukan Dinas PUPR belum mencapai efektivitas maksimal.

Secara teoritis, berdasarkan Teori Efektivitas Kinerja Organisasi, kelemahan Dinas PUPR dalam pencegahan banjir terletak pada aspek produktivitas, kualitas, dan kepuasan publik yang belum optimal. Sedangkan

dalam perspektif Teori Manajemen Bencana Nick Carter, pencegahan banjir di Banjarmasin masih lebih banyak berorientasi pada mitigasi struktural, sementara mitigasi non-struktural seperti partisipasi masyarakat dan pengendalian tata ruang belum berjalan maksimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kinerja Dinas PUPR Kota Banjarmasin dalam pencegahan banjir masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi internal maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas anggaran, penguatan koordinasi antar lembaga, penegakan tata ruang yang lebih konsisten, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar pencegahan banjir dapat dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif.